BAB II

TINJAUAN UMUM DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT

2.1 Sejarah

Sejalan dengan perkembangan jaman, nama dan susunan organisasi serta tata kerja bidang perikanan dan kelautan di Jawa Barat mengalami beberapa kali perubahan. Berikut ini diuraikan secara ringkas perubahan-perubahan dimaksud semenjak periode pra-kemerdekaan hingga sekarang (2006).

PERIODE PRA-KEMERDEKAAN

1. Jaman Penjajahan Belanda

Pada jaman ini, urusan perikanan di Jawa Barat ditangani oleh 2 instansi, yaitu perikanan darat oleh *Onder afdeeling Binen Visserij Dienst* berkedudukan di Bandung, dan perikanan laut oleh *Afdeeling Instituee van de Zee Visscherij West & Alidden* berkedudukan di Cirebon.

Onder afdeeling Binen Visserij Dienst merupakan bagian dari Dinas Perikanan dengan titik berat tugasnya menghimpun data perikanan darat. Pada awalnya mengadakan beberapa petugas khusus yang direkrut dari *Landbouw I oorlichting Dienst* (LVD). Pekerjaannya diutamakan menginventarisasi obyek-obyek dan pengumpulan data bersama-sama dengan *Laboratorium voor de Binan Visserii* yang ada di Bogor (yang didirikan pada tahun 1927), di samping memberikan bimbingan dan bantuan kepada para petani ikan di daerah-daerah yang merupakan pusat pengembangan perikanan daratnya.

Dengan berkembangnya usaha perikanan darat dibeberapa daerah, secara berangsur-angsur kedudukan para petugas perikanan darat (*adjunet visserij consulent, visserij opzichter dan visserij mantri*) ditingkat kabupaten terpisah dari LVD, namun masih dalam lingkup LVD keresidenan.

2. Jaman Pendudukan Jepang

Pengelolaan bidang perikanan hampir sama dengan waktu jaman penjajahan Belanda, hanya bedanya pada jaman pendudukan Jepang dibentuk Jawatan Perikanan Darat ditiap kabupaten dan adanya ahli perikanan darat tersendiri di tingkat Keresidenan dalam arti luas.

Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pengumpulan ikan guna kepentingan militer Jepang, disamping kebutuhan pangan lainnya.

Kemudian dibidang perikanan laut dibentuk Jawatan Perikanan Laut (*Kaken Gyogo Kenkyu Sao*). Di berbagai daerah didirikan Jawatan Penerangan Perikanan Laut (*Suisan Shidozo*), sedangkan perkumpulan-perkumpulan nelayan dijadikan Koperasi Perikanan Laut (*Gyogo Kumiai*). Keadaan pada waktu itu sangat sulit bagi para pejabat dan pengurus koperasi untuk mengadakan penyuluhan dan pelayanan bagi para nelayan. Tugas utama mereka adalah mengumpulkan ikan asin guna keperluan balatentara Jepang.

Kepentingan nelayan dan usahanya tidak mendapat perhatian. Dengan semboyan "bekerja untuk masyarakat", para nelayan dipaksa menjual ikannya dengan harga yang telah ditentukan amat rendah, rata-rata seperempat harga pasar, tanpa adanya jaminan mendapatkan sarana perikanan secara khusus dimurahkan pula.

PERIODE PASCA-KEMERDEKAAN

1. Masa Pra-Pembentukan Propinsi Jawa Barat (1945-1951)

Pada periode transisi, yaitu setelah Proklamasi Kemerdekaan RI sampai dibentuknya Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1950, lembaga yang menangani perikanan darat dan laut adalah Jawatan Pertanian yang merupakan instansi vertikal pusat di bawah Kementrian kemakmuran (kemudian menjadi Kementrian Pertanian), bersama-sama dengan bidang pertanian rakyat, perkebunan, kehewanan dan penyaluran bahan makanan.

Khusus untuk bidang perikanan darat, pada akhir masa transisi terdapat Kantor Perikanan Darat, yang dipimpin oleh inspektur.

Kemudian *Laboratorium voor de Binen Visserij* di Bogor dirubah namanya menjadi Laboratorium Perikanan Darat. Laboratoriun ini pada waktu itu bernaung di bawah Balai Besar Penelitian Pertanian Bogor.

2. Tahun 1973-sekarang

Pada tahun 1973 Jawatan Perikanan Laut dan Jawatan Perikanan Darat Provinsi Jawa Barat dilebur ke dalam satu Jawatan dengan nama Jawatan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 27/PD-DPRD/1973/tanggal 16 Februari 1973 berkedudukan di Bandung. Adapun dilebur atau disatukannnya Jawatan Perikanan Laut dan Jawatan Perikanan Darat sehubungan dengan ditingkat pusat telah disatukannya Direktorat Jenderal Pengolahan Kekayaan Laut pada

Departemen Pertanian kedalam Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Pertanian.

Penyatuan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 184 tahun 1968. Susunan Organisasi dan Tata kerjanya lebih rinci ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 81/A.IV/15/73 tanggal 20 Maret 1973, yaitu sebagai berikut: Kepala Jawatan; Biro I Perencanaan dan Evaluasi (terdiri atas: Bagian Statistik, bagian Perencanaan, Bagian Pengendalian & Operasional); Biro II Penyuluhan dan Pendidikan (terdiri atas: Bagian Penyuluhan, Bagian Pendidikan, Bagian Hukum); Biro III Umum (terdiri atas: Bagian Administrasi, Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian, Bagian Peralatan).

Disamping biro-biro tersebut Jawatan dilengkapi pula dengan sejumlah ahli, terdiri atas: 2 orang ahli Budidaya Air tawar & Budidaya Air Payau; 3 orang ahli perikanan laut; Seorang ahli Teknologi & Sumber Hayati; Seorang ahli Pemasaran; Seorang ahli Koperasi; dan Seorang ahli Kesejahteraan Keluarga.

Sejak tahun 1975 dengan mengacu pada Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No, 107/A.V/18/SK/75, istilah atau sebutan JAWATAN diganti menjadi DINAS. Semenjak itu susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah mengalami beberapa kali perubahan dan atau penyempurnaan.

Barulah pada tahun 1978 dilakukan pemantapan organisasi dan tata kerja dinas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977, yaitu kemudian di daerah tingkat I berturut-turut ditetapkan dengan Peraturan Daerah (perda) No. 8 Tahun 1978 dan

Perda No. 14 Tahun 1983 Jo Perda No.7 Tahun 1986, dengan susunan: Kepala Dinas, Bagian tata usaha, Subdinas Bina Program, subdinas Bina Penangkapan, Subdinas Bina Budidaya, Subdinas Bina Mutu & Pemasaran, Subdinas Bina Usaha, Subdinas Bina Prasarana dan Subdinas Penyuluhan.

Tahun 1994, terjadi lagi reorganisasi dinas dengan penciutan subdinas berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/3(i05/Sj tanggal 21 Oktober 1994, yang baru berlaku efektif pada tahun 1996 setelah terbit Perda No. 15 tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingakt I Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 4 tahun 1997 tanggal 24 Februari 1997 tentang Rincian Tugas Unit di lingkungan Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Adapun Struktur Organisasinya adalah : Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Bina Produksi, Sub Dinas Bina Sumber Hayati, Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan, Sub Dinas Bina Prasarana dan Sub Dinas Penyuluhan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No, 823.23/SK-4566-G/Peg/97 tanggal 7 Juli 1997 telah dilaksanakan pengukuhan/pengangkatan kembali dalam jabatan di lingkungan Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 15 tahun 1995 tanggal 12 Juli 1995 dan telah dilantik oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 September 1999 yaitu Kepala Bagian/Sub Dinas (Eselon III) 6 orang dan Kepala Sub Bagian (Eselon IV) 22 orang.

Tahun 2001 sejalan dengan terbitnya Undang-undang tentang Otonomi Daerah terjadi lagi perombakan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun

2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditandai dengan munculnya jabatan Wakil Kepala Dinas dan munculnya kembali Sub Dinas Bina Program. Adapun struktur organisasi terakhir ini adalah terdiri dari jabatan: Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Bina Program, Sub Dinas Eksplorasi Kelautan, Sub Dinas Produksi dan Konservasi, Sub Dinas Bina Prasarana serta Sub Dinas Bina Usaha.

Tahun 2002 organisasi Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dilengkapi dengan dibentuknya secara formal 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas (setara Eselon III), yang sebelumnya terdiri dari unit-unit kerja teknis di bidang pembenihan ikan, budidaya ikan, laboratorium, pelabuhan, pendidikan dan latihan serta konservasi. (Lihat tentang UPTD). Pembentukan UPTD tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000. Selanjutnya untuk mengatur tugas pokok UPTD diterkanlah Keputusan Gubernur Jawa Barat no. 55 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat.

Tahun 2004 sejalan dengan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi keorganisasian dinas maka terjadi lagi perubahan struktur organisasi Dinas Perikanan yang ditandai dengan tidak diangkatnya Jabatan Wakil Kepala Dinas. Namun demikian perubahan terakhir ini acuannya tetap pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 serta Kepgub No. 55 Tahun 2002. Adapun struktur organisasi terakhir ini adalah terdiri dari jabatan: Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Bina Program, Sub Dinas Eksplorasi Kelautan, Sub Dinas Produksi dan Konservasi, Sub Dinas Bina Prasarana serta Sub Dinas Bina Usaha.

SEJARAH KEPEMIMPINAN

Tahun 1948-1973 : Moch. Ahyar (Jawatan Perikanan Darat)

Tahun 1953-1959 : Maskud (Jawatan Perikanan Laut)

Tahun 1963-1964 : Suyadi (Jawatan Perikanan Laut)

Tahun 1964-1966 : R. Suwondo (Jawatan Perikanan Laut)

Tahun 1966-1973 : R. Hilman Wiramihardja (Jawatan Perikanan Laut) 1974-1978 (Dinas Perikanan)

Tahun 1978-1983 : Ir. Damanhuri SK (Dinas Perikanan Prop. DT. I Jawa Barat)

Tahun 1983-1986 : Ir. Untung Wahyono, M.Sc. (Dinas Perikanan Prop. DT. I Jawa Barat)

Tahun 1986-1996 : Drs. H. T. Asikin (Dinas Perikanan Prop. DT. I Jawa Barat)

Tahun 1996-1998 : Ir. H. Sugiri Elon (Dinas Perikanan Prop. DT. I Jawa Barat)

Tahun 1999-2004 : Ir. H. Djunaidi (Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat)

Tahun 2004-..... : Ir. H. Darsono (Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat)

2.2 Profil Instansi

Nama Instansi : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

PROVINSI JAWA BARAT.

Bidang Instansi : Kelautan dan perikanan provinsi Jawa Barat.

Badan hukum : Organisasi dan tata kerja Dinas Perikana Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, berdasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 15 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PerikananProvinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : 56 Tahun 1996 tanggal 12 April 1996 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 seri D tanggal 22 April 1996, serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 Tahun 1997 tanggal 24 Februari 1997.

Visi instansi : Dinas Perikanan telah menetapkan visi: "**Prima Dalam Pelayanan Menuju Perikanan Jawa Barat yang Tangguh 2010".** Visi Dinas Perikanan tersebut mengandung beberapa pemahaman sebagai berikut:

A. **Prima,** berarti sempurna atau sangat baik.
B. **Tangguh,** berarti kuat, sukar dikalahkan, tidak lemah tabah dan tahan menderita, serta kukuh.

Misi instansi : Agar visi Dinas Kelautan dan Perikanan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik maka ditetapkan misi Dinas sebagai berikut:

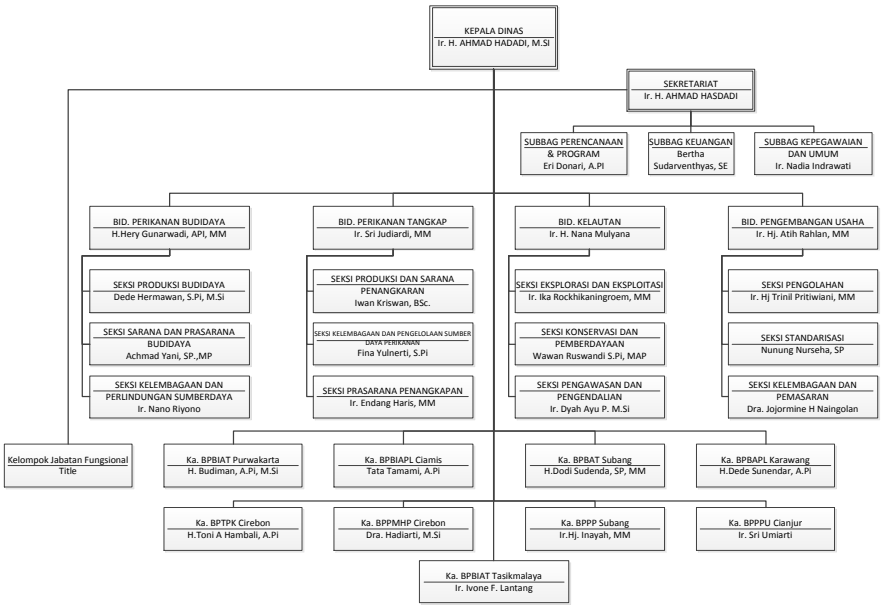
A. Mendorong peningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan yang bernilai ekonomis dengan penerapan teknologi berwawasan lingkungan.

B. Meningkatkan ketersediaan produk perikanan yang berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan bahan baku industri secara berkelanjutan.

C. Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan.

2.3 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT



Tabel II.1